



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POTENSI INFLASI PANGAN YANG TINGGI

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Yiyis Aldi Mebra

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pangan atau komponen harga bergejolak (*volatile food*) pada Juni 2024 mencapai 5,96% secara *year on year* (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,96%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi harga bergejolak adalah beras, cabai merah, dan cabai rawit. Tekanan inflasi komponen harga bergejolak mengalami penurunan namun masih tinggi, di mana inflasi komponen bergejolak pada Mei 2024 lebih tinggi mencapai 8,14%. Berdasarkan catatan BPS, harga beras pada Juni naik, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran. Data BPS menunjukkan, di penggilingan, harga beras naik 0,80% *month to month* (mtm) dan 11,93% YoY. Sementara, di tingkat grosir, harga beras naik 0,28% mtm dan 10,87% yoy.

Perubahan iklim serta fenomena La Nina pada tahun ini juga berisiko meningkatkan harga pangan ke depan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diwaspadai pemerintah. Selain itu, pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah tentunya memengaruhi kondisi pangan yang berasal dari impor. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut menyebabkan harga pangan impor turut meningkat, bukan hanya beras tetapi juga bawang putih dan terigu.

Adanya potensi inflasi komponen bergejolak yang tinggi, pemerintah masih optimistis inflasi pada tahun ini akan terjaga di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 pada pertengahan Juni lalu, pemerintah akan menempuh strategi kebijakan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4K) untuk menjaga inflasi tahun ini.

Strategi kebijakan 4K dilakukan melalui beberapa hal. *Pertama*, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah, telah berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi. *Kedua*, peningkatan produksi domestik diantaranya diupayakan melalui program pompanisasi, penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Kemudian yang *ketiga*, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Ada beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi pada umumnya dan inflasi pangan pada khususnya, dan perlu dilanjutkan yakni kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah serta penyediaan data pangan yang akuntabel. Saat ini telah tersedia data harga secara *real time* dan akurat. Namun, data pasokan pangan saat ini masih dalam pengembangan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

Atensi DPR

Pemerintah harus terus berupaya untuk mengendalikan inflasi pangan. Jika harga-harga komoditas pangan semakin tidak terkendali, daya beli masyarakat akan turun. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas nasional. Upaya penting yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas komoditas pangan melalui penerapan teknologi maju.

DPR RI khususnya komisi XI harus mengawasi kebijakan dan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga kestabilan harga komoditas pangan. Selain itu, perlu mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam meningkatkan produksi komoditas pangan agar tingkat inflasi dapat terus terkendali sehingga target pemerintah untuk mencapai inflasi tahunan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5% dapat terealisasi.

Sumber

cnbcindonesia.com, 3 Juli 2024;
dpr.go.id, 15 Juni 2024;
ekon.go.id, 14 Juni 2024;
Kontan, 02 Juli 2024; dan
kontan.co.id, 01 dan 02 Juli 2024.